

## ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JASA KELAUTAN KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sunarto Suwu<sup>1</sup>, Eliyanti Agus Mokodompit<sup>2</sup>  
Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: Juni 2025

Revised: July 2025

Accepted: July 2025

Available online

Korespondensi: Email:

<sup>1</sup>[suwusonarto1@gmail.com](mailto:suwusonarto1@gmail.com)

<sup>2</sup>[eliyantiagusmokodompit@uho.ac.id](mailto:eliyantiagusmokodompit@uho.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstrak

*This research analyzes the policy direction for marine services development in South Buton Regency within the context of Indonesia's blue economy implementation. Utilizing library research methodology with qualitative content analysis approach, this study identifies existing conditions, determinant factors, and formulates strategic recommendations for sustainable marine services development. Findings indicate that South Buton Regency faces structural challenges including limited maritime infrastructure, institutional coordination fragmentation, and minimal human resource capacity. Internal factors encompass fiscal and technological capacity limitations, while external factors include national policy dynamics and global maritime industry paradigm shifts. Implementation of the national blue economy framework requires contextual adaptation*

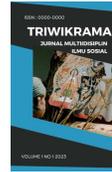
*considering unique archipelagic characteristics. Strategic recommendations include integrated infrastructure development, institutional capacity strengthening, investment incentive policy formulation, stakeholder coordination optimization, and environmental sustainability integration to achieve inclusive and sustainable blue economy development.*

**Keywords:** *marine services, blue economy, maritime policy*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis arah kebijakan pengembangan jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan dalam konteks implementasi ekonomi biru Indonesia. Menggunakan metodologi library research dengan pendekatan content analysis kualitatif, studi ini mengidentifikasi kondisi eksisting, faktor-faktor determinan, dan merumuskan rekomendasi strategis pengembangan jasa kelautan berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa Kabupaten Buton Selatan menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan infrastruktur maritim, fragmentasi koordinasi kelembagaan, dan minimnya kapasitas sumber daya manusia. Faktor internal meliputi keterbatasan kapasitas fiskal dan teknologi, sedangkan faktor eksternal mencakup dinamika kebijakan nasional dan perubahan paradigma industri maritim global. Implementasi kerangka ekonomi biru nasional memerlukan adaptasi kontekstual yang mempertimbangkan karakteristik unik wilayah kepulauan. Rekomendasi strategis meliputi pengembangan infrastruktur terpadu, penguatan kapasitas kelembagaan, formulasi kebijakan insentif investasi, optimalisasi koordinasi stakeholder, dan integrasi aspek keberlanjutan lingkungan untuk mencapai ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** jasa kelautan, ekonomi biru, kebijakan maritim



---

## PENDAHULUAN

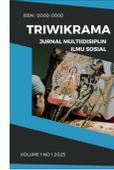
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 95.181 kilometer memiliki potensi *marine services* yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sektor kelautan Indonesia tidak hanya mencakup perikanan dan pariwisata bahari, tetapi juga berbagai jasa kelautan seperti transportasi laut, *port services*, *offshore services*, dan *maritime logistics* yang menjadi tulang punggung konektivitas antar pulau (Ariyani, 2025). Pengembangan ekonomi biru Indonesia telah ditetapkan melalui lima strategi utama ekonomi biru, meliputi: perluasan kawasan konservasi laut; implementasi perikanan berbasis kuota; promosi akuakultur berkelanjutan; pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta penanganan sampah laut. Transformasi ekonomi hijau Indonesia menekankan pada ekonomi rendah karbon dan ekonomi sirkular, ekonomi biru, serta transisi energi yang mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dengan pelestarian ekosistem laut (Rizky & Ginting, 2025).

Kabupaten Buton Selatan sebagai salah satu daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Buton pada tahun 2014 memiliki karakteristik geografis yang unik dengan wilayah kepulauan yang tersebar di perairan Sulawesi Tenggara. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan telah mengalokasikan program bantuan untuk nelayan pada tahun 2022 sebesar Rp6,3 miliar, yang mengindikasikan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor kelautan. Posisi strategis Buton Selatan yang berada di jalur pelayaran internasional antara Laut Banda dan Laut Flores menjadikan wilayah ini memiliki potensi besar untuk pengembangan *maritime services* yang mencakup *shipping services*, *marine transportation*, dan *port logistics*. Kondisi geografis kepulauan dengan jarak antar pulau yang relatif jauh membutuhkan sistem transportasi laut yang efisien dan terintegrasi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat (Widihastuti & Zulham, 2020).

Pengembangan jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan arah kebijakan yang tepat dan terstruktur. Keterbatasan infrastruktur pelabuhan, rendahnya kualitas *maritime services*, minimnya investasi sektor swasta, serta lemahnya koordinasi antar stakeholder menjadi kendala utama dalam optimalisasi potensi ekonomi kelautan daerah. Dalam fase implementasi awal (2023-2024), fokus utama Indonesia adalah pada konsolidasi ekosistem ekonomi biru dan peningkatan koordinasi antar stakeholder dengan pembentukan Sekretariat Ekonomi Biru yang berbasis di Bappenas. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi kebijakan tingkat nasional dengan kebutuhan dan potensi lokal di daerah seperti Buton Selatan (Rustan et al., 2021).

Konsep *blue economy* yang didefinisikan World Bank sebagai pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, penciptaan lapangan kerja, dan pemeliharaan kesehatan ekosistem laut menjadi paradigma penting dalam pengembangan jasa kelautan (Khoiriyah, 2024). Ekonomi biru adalah pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, penciptaan lapangan kerja, dan pemeliharaan kesehatan ekosistem laut. Model bisnis ekonomi biru dapat diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang menggunakan sektor perikanan dan kemaritiman sebagai mata pencaharian. Implementasi konsep ini di Kabupaten Buton Selatan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perumusan kebijakan pengembangan jasa kelautan.

Studi tentang arah kebijakan pengembangan jasa kelautan di tingkat kabupaten masih terbatas, khususnya untuk daerah kepulauan seperti Buton Selatan yang memiliki karakteristik unik. Laporan World Bank "Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia" merinci status, tren, dan peluang menuju ekonomi biru di Indonesia, membangun upaya dan



tujuan yang telah ditetapkan pemerintah (World Bank, 2021). Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi arah kebijakan yang tepat dalam mengoptimalkan potensi jasa kelautan Kabupaten Buton Selatan, mengingat sektor ini memiliki *multiplier effect* yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan *maritime cluster* yang mencakup *shipping*, *port services*, *marine logistics*, dan *maritime technology* dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kondisi eksisting jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan saat ini?; 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan?; dan 3) Bagaimana arah kebijakan yang tepat untuk pengembangan jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan dalam mendukung ekonomi biru daerah?

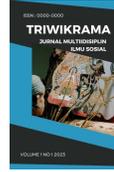
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis kondisi eksisting jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan meliputi infrastruktur, *human resources*, teknologi, dan kelembagaan; 2) Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan; dan 3) Merumuskan arah kebijakan strategis pengembangan jasa kelautan yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi lokal Kabupaten Buton Selatan.

Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan kelautan dan *maritime economics*, khususnya dalam konteks pengembangan jasa kelautan di daerah kepulauan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam merumuskan kebijakan pengembangan jasa kelautan yang efektif dan berkelanjutan. Bagi stakeholder lainnya seperti pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang potensi dan tantangan pengembangan jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan pengembangan kapasitas *maritime services*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan sebagai metodologi utama untuk menganalisis arah kebijakan pengembangan jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan. Metode penelitian kepustakaan dipilih karena kemampuannya dalam menganalisis fenomena kebijakan yang kompleks melalui pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai sumber dokumenter yang relevan dan kredibel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap kerangka teoretis, praktik empiris, dan tren kebijakan kelautan yang telah berkembang dalam literatur akademik maupun dokumentasi resmi pemerintah (Hamzah, 2020).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui *systematic literature collection* dengan mengidentifikasi sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan kebijakan jasa kelautan, ekonomi biru, dan pengembangan wilayah kepulauan. Sumber data primer meliputi dokumen kebijakan pemerintah pusat dan daerah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi institusi, dan publikasi hasil penelitian dari lembaga penelitian terpercaya. Sumber data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah terindeks, buku teks, laporan organisasi internasional, dan publikasi akademik yang memiliki relevansi tinggi dengan topik penelitian. Kriteria seleksi sumber data menekankan pada kredibilitas penulis, kualitas publikasi, relevansi topik, dan kebaruan informasi yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020-2025.



Analisis data menggunakan teknik *content analysis* dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep kunci yang muncul dari berbagai sumber literatur. Proses analisis dimulai dengan *data coding* untuk mengkategorikan informasi berdasarkan dimensi-dimensi utama pengembangan jasa kelautan, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, infrastruktur, teknologi, dan ekonomi. Teknik triangulasi data diterapkan untuk memverifikasi konsistensi temuan dari berbagai sumber dan meminimalisir bias interpretasi. Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan praktik kebijakan jasa kelautan di berbagai wilayah kepulauan, baik dalam konteks nasional maupun internasional, guna mengidentifikasi *best practices* yang dapat diadaptasi untuk Kabupaten Buton Selatan.

Validitas penelitian dipastikan melalui penerapan *methodological rigor* dalam seleksi sumber, analisis kritis terhadap kualitas data, dan penggunaan kerangka teoretis yang mapan dalam studi kebijakan maritim. Reliabilitas penelitian dicapai melalui dokumentasi yang sistematis terhadap proses pengumpulan dan analisis data, serta konsistensi dalam penerapan kriteria evaluasi untuk setiap sumber literatur yang digunakan. Keterbatasan penelitian diakui dalam hal ketergantungan pada ketersediaan literatur yang berkualitas dan *potential publication bias* yang mungkin mempengaruhi representativitas temuan penelitian terhadap kondisi riil di lapangan.

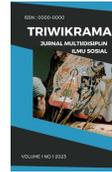
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Kondisi Eksisting Jasa Kelautan di Kabupaten Buton Selatan

Evaluasi komprehensif terhadap kondisi eksisting jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan mengungkapkan karakteristik unik sebagai wilayah kepulauan yang memiliki tantangan infrastruktur dan konektivitas yang kompleks. Berdasarkan data statistik terkini, wilayah ini menghadapi kendala fundamental dalam pengembangan sektor maritim yang berkelanjutan, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan sistem transportasi laut yang belum terintegrasi secara optimal. Kondisi geografis kepulauan dengan distribusi pulau yang tersebar menciptakan kebutuhan mendesak akan sistem jasa kelautan yang efisien dan dapat diandalkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal (Mustari et al., 2023).

Infrastruktur pelabuhan yang ada saat ini masih terbatas dalam kapasitas dan kualitas layanan, dengan sebagian besar fasilitas pelabuhan masih bersifat sederhana dan belum memenuhi standar internasional untuk mendukung pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan. Analisis terhadap data statistik kesejahteraan rakyat menunjukkan bahwa sektor transportasi laut masih menjadi bottleneck utama dalam pengembangan ekonomi daerah, dengan tingkat aksesibilitas antar pulau yang masih rendah dan biaya transportasi yang relatif tinggi. Kondisi ini berdampak langsung pada efisiensi distribusi barang dan mobilitas penduduk, yang pada akhirnya mempengaruhi daya saing ekonomi regional (Fuady, 2023).

Kapasitas sumber daya manusia dalam sektor jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan masih memerlukan peningkatan signifikan, khususnya dalam aspek keterampilan teknis dan manajerial yang sesuai dengan standar industri maritim modern. Keterbatasan tenaga kerja terampil di bidang navigasi, manajemen pelabuhan, dan teknologi maritim menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi potensi jasa kelautan daerah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya program pengembangan kapasitas yang sistematis dan berkelanjutan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menghadapi transformasi ekonomi biru.



## 4.2 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Jasa Kelautan

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan kompleksitas interaksi antara dimensi internal dan eksternal yang membentuk dinamika sektor maritim daerah. Faktor internal utama meliputi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, lemahnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta minimnya investasi sektor swasta dalam pengembangan jasa kelautan. Kondisi topografi kepulauan yang menantang juga menjadi faktor geografis yang mempengaruhi biaya pembangunan infrastruktur dan operasional layanan transportasi laut (Putra & Djalante, 2020).

Faktor eksternal yang signifikan mencakup dinamika kebijakan nasional ekonomi biru Indonesia, perubahan regulasi sektor transportasi laut, dan fluktuasi kondisi ekonomi global yang mempengaruhi perdagangan maritim regional. Implementasi kebijakan ekonomi biru nasional yang menekankan pada lima strategi utama menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan jasa kelautan di tingkat kabupaten. Adaptasi terhadap standar internasional dalam industri maritim juga menjadi faktor eksternal yang memerlukan perhatian khusus dalam perumusan strategi pengembangan lokal (Mahadiansar et al., 2023).

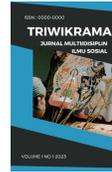
Faktor sosial-ekonomi masyarakat lokal juga mempengaruhi tingkat adopsi dan dukungan terhadap program pengembangan jasa kelautan, dengan tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, dan kesadaran akan potensi sektor maritim yang masih bervariasi di berbagai wilayah. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi biru memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial-budaya lokal dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Integrasi antara pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut menjadi tantangan yang memerlukan solusi inovatif dan berkelanjutan.

## 4.3 Kerangka Kebijakan Ekonomi Biru Nasional dan Implementasinya di Tingkat Lokal

Kerangka kebijakan ekonomi biru Indonesia telah diformulasikan melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan lima pilar utama: perluasan kawasan konservasi laut, implementasi perikanan berbasis kuota, promosi akuakultur berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah laut. Implementasi kerangka kebijakan ini di tingkat lokal memerlukan adaptasi yang sesuai dengan karakteristik unik setiap daerah, termasuk Kabupaten Buton Selatan dengan kondisi geografis kepulauannya yang spesifik. Tantangan utama terletak pada translasi visi makro ekonomi biru menjadi program operasional yang dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat kabupaten (Darajati, 2024).

Koordinasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal memerlukan mekanisme sinkronisasi yang dapat mengakomodasi perbedaan kapasitas dan prioritas pembangunan di setiap daerah. Pembentukan Sekretariat Ekonomi Biru yang berbasis di Bappenas merupakan langkah strategis dalam konsolidasi ekosistem ekonomi biru, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengintegrasikan program nasional dengan strategi pembangunan lokal. Kondisi ini menuntut pengembangan kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan dukungan kebijakan nasional.

Implementasi kebijakan ekonomi biru di Kabupaten Buton Selatan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi ekosistem laut lokal, potensi sumber daya alam, dan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat. Strategi adaptasi kebijakan harus mampu mengintegrasikan aspek konservasi lingkungan dengan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan pelestarian ekosistem. Pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi implementasi menjadi kunci keberhasilan dalam membangun dukungan masyarakat dan stakeholder lokal.



#### **4.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Jasa Kelautan di Wilayah Kepulauan**

Analisis mendalam terhadap tantangan pengembangan jasa kelautan di wilayah kepulauan mengungkapkan kompleksitas permasalahan yang bersifat multidimensional dan saling terkait. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur fisik, tingginya biaya investasi untuk pembangunan fasilitas maritim, dan kompleksitas regulasi yang seringkali tidak sinkron antar tingkat pemerintahan. Kondisi geografis kepulauan yang terisolasi juga menciptakan tantangan logistik yang signifikan dalam distribusi barang dan jasa, yang berdampak pada tingginya biaya operasional dan rendahnya efisiensi ekonomi (Sujiwo & Nurlaili, 2024).

Keterbatasan akses terhadap teknologi maritim modern menjadi hambatan struktural yang mempengaruhi daya saing jasa kelautan di wilayah kepulauan. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan kepulauan terpencil menciptakan disparitas dalam kualitas layanan dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan industri maritim global. Kondisi ini memerlukan strategi pengembangan yang dapat menjembatani kesenjangan teknologi melalui investasi infrastruktur telekomunikasi dan program transfer teknologi yang tepat sasaran (Sarjito, 2023).

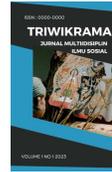
Namun demikian, wilayah kepulauan juga menawarkan peluang strategis yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan jasa kelautan yang berkelanjutan. Potensi sumber daya kelautan yang melimpah, posisi geografis yang strategis dalam jalur perdagangan internasional, dan keunikan ekosistem laut dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam pengembangan ekonomi biru. Diversifikasi jasa kelautan yang mencakup transportasi, pariwisata bahari, dan layanan logistik dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian daerah.

#### **4.5 Rekomendasi Arah Kebijakan Strategis Pengembangan Jasa Kelautan**

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi eksisting dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan, dapat dirumuskan rekomendasi arah kebijakan strategis yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Rekomendasi pertama adalah pengembangan infrastruktur maritim terpadu yang mencakup modernisasi pelabuhan, pembangunan sistem transportasi laut yang efisien, dan integrasi teknologi informasi dalam manajemen jasa kelautan. Strategi ini memerlukan investasi jangka panjang yang dapat dilakukan melalui skema kemitraan pemerintah-swasta dan pemanfaatan instrumen pembiayaan inovatif (Sarjito, 2023).

Rekomendasi kedua adalah penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui program pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan. Pengembangan pusat pelatihan maritim di tingkat kabupaten dapat menjadi strategi jangka panjang untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dalam berbagai aspek jasa kelautan. Kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan internasional dapat meningkatkan kualitas program pengembangan kapasitas dan memastikan relevansi dengan kebutuhan industri maritim modern (Nawir et al., 2024).

Rekomendasi ketiga adalah formulasi kebijakan insentif yang dapat menarik investasi sektor swasta dalam pengembangan jasa kelautan. Paket insentif yang mencakup kemudahan perizinan, keringanan pajak, dan dukungan infrastruktur dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk mengembangkan bisnis maritim di wilayah kepulauan. Strategi promosi investasi yang efektif juga memerlukan penyediaan informasi yang lengkap tentang potensi ekonomi dan keunggulan kompetitif daerah.

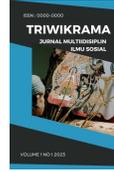


## KESIMPULAN

Studi komprehensif terhadap arah kebijakan pengembangan jasa kelautan di Kabupaten Buton Selatan mengungkapkan kompleksitas tantangan struktural yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Kondisi eksisting menunjukkan keterbatasan infrastruktur maritim, fragmentasi koordinasi kelembagaan, dan minimnya kapasitas sumber daya manusia yang menjadi hambatan utama optimalisasi potensi ekonomi biru daerah. Analisis faktor-faktor determinan mengidentifikasi interaksi kompleks antara dimensi internal berupa keterbatasan kapasitas fiskal dan teknologi, serta faktor eksternal meliputi dinamika kebijakan nasional dan perubahan paradigma industri maritim global. Implementasi kerangka ekonomi biru nasional memerlukan adaptasi kontekstual yang mempertimbangkan karakteristik unik wilayah kepulauan dan kebutuhan spesifik komunitas lokal. Rekomendasi strategis mencakup pengembangan infrastruktur terpadu, penguatan kapasitas kelembagaan, formulasi kebijakan insentif investasi, optimalisasi koordinasi stakeholder, dan integrasi aspek keberlanjutan lingkungan dalam setiap tahapan pengembangan jasa kelautan yang berorientasi pada pencapaian ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

## REFERENCE

- Ariyani, D. (2025). Optimalisasi Efisiensi Logistik Maritim: Peran Manajemen Pelabuhan dan Strategi Mengatasi Hambatan Pabean Dalam Meningkatkan Ekspor Impor Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1), 95-104. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9619>
- Darajati, M. R. (2024). The Urgency of Implementing the Blue Economy Concept in Indonesian Marine Governance. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(1), 15-22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v14i1.12972>
- Fuady, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Tol Laut. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2a), 284-293. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2a.628>
- Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Kepustakaan Library Research. *Malang: Literasi Nusantara Abadi*.
- Khoiriyah, A. Z. (2024). Implementasi Ekonomi Biru Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1331-1356. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4161>
- Mahadiansar, M., Alfiandri, A., & Marlioni, M. (2023). PESTEL Analysis of Blue Economy Development Policy in Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 70. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237005005>
- Mustari, T., Tenri, A., Ramadan, S., & Munafi, L. O. A. (2023). Kearifan Lokal dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Buton Kearifan. In *Lombok Barat: Nashir Al-Kutub Indonesia*.
- Nawir, M., Yuniar, J., Nur, D., & Wijaya, A. I. (2024). Strategi Pengembangan SDM Maritim Indonesia Berbasis Kearifan Lokal. *Ocean Engineering : Jurnal Ilmu Teknik Dan Teknologi Maritim*, 3(1), 10-18.
- Putra, A. A., & Djalante, S. (2020). Port Infrastructure Development Strategy in Supporting Development Islands Areas. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 6(6), 929-933.
- Rizky, K., & Ginting, M. M. (2025). Integrasi Green Economy dan Blue Economy untuk Pembangunan Berkelanjutan Sektor Perikanan di Indonesia Economy dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir secara. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 1.



- 
- Rustan, F. R., Soeparyanto, T. S., Sarita, U., & Prasetya, M. S. (2021). Penilaian Investasi Ekonomi Alternatif Pemilihan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Manajemen Aset Dan Penilai*, 1(1), 31-38. <https://doi.org/10.56960/jmap.v1i1.16>
- Sarjito, A. (2023). Peran Teknologi Dalam Pembangunan Kemaritiman Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(4), 219-236. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i4.483>
- Sujiwo, A. S., & Nurlaili, N. (2024). Pengembangan Tata Kelola Ekonomi Biru Untuk Memperkuat Blue Economy Development Index di Indonesia. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 13(1), 67. <https://doi.org/10.33512/jpk.v13i1.23726>
- Widihastuti, R., & Zulham, A. (2020). Strategi Pengembangan Industri Perikanan Tangkap Di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(2), 105-115. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v9i2.7475>
- World Bank. (2021). Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia. In *The World Bank*.